

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

# RANCANGAN AKHIR RENSTRA TAHUN 2025 - 2029



[diskopukmperin.dumaikota.go.id](http://diskopukmperin.dumaikota.go.id)

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu alaikum Wr Wb,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025 sampai dengan 2029 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025 - 2029 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Dumai, 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

  
SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740925 199502 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	37
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Dumai 2025-2029.....	39
3.3 Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	40
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	42
BAB VII PENUTUP.....	63

## **DAFTAR TABEL**

	Hal
Tabel Perkembangan Koperasi di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023	16
Tabel Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019-2023	17
Tabel Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020- 2024	17
Tabel Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2019-2023	18
Tabel Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2023	19
Tabel Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2019-2023	19
Tabel Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023	20
Tabel Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	29
Tabel Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan Perindustrian Kota Dumai	36
Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	38
Tabel Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	41
Tabel Teknik Merumuskan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	57
Tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	46
Tabel Daftar subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah	60
Tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	61
Tabel Indikator Kinerja Kunci	62

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 antara lain disebutkan tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah :

- Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah ;
- Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan dokumen perencanaan yang selaras dari pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan yang perlu diselaraskan khususnya dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhususan daerah.

Lebih lanjut, petunjuk teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setelah dilantiknya pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu rencana, pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai eksekutor dari perencanaan pembangunan daerah, perlu membuat sebuah rencana strategis yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai kontrak politik Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dalam lingkup teknis Perangkat Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah terdiri dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Rencana Strategis (Renstra) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Walikota Dumai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan.

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kota Dumai wajib menyusun RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan lima tahunan dalam bentuk Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025- 2029 melalui Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025 – 2029.

Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mencakup peningkatan sistem pendukung usaha yang mencakup lembaga atau sistem yang menyediakan dukungan bagi peningkatan akses koperasi dan UMKM kesumber daya produktif dalam rangka perluasan usaha dan perbaikan kinerja. Sumber daya produktif mencakup bahan baku, modal, tenaga kerja terampil, informasi dan teknologi. Perluasan usaha mencakup peningkatan tata laksana kelembagaan, peningkatan kapasitas dan perluasan jangkauan pasar. Sementara itu kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tataran mikro mencakup peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM serta perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari aspek kewirausahaan, maupun kemampuan teknis, manajemen dan pemasaran.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai berlandaskan ketentuan peraturan perundangan sebagai acuan normatif, adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk halal.
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel/Kelurahan Merah Putih;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri.
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perindustrian;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha

Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
22. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Koedifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
24. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
25. Surat Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045.
27. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025–2045.
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ini yaitu untuk menjelaskan/menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sesuai tujuan, sasaran dan program/kegiatan sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
2. Mendorong penguatan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai institusi perencana daerah
3. Sebagai alat/dasar pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
4. Penyelarasan pencapaian tujuan pembangunan nasional Tahun 2025-2030 serta tujuan pembangunan provinsi tahun 2025-2030

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025- 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

##### **1.1 : Latar Belakang**

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD tahun 2025-2029 dengan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

##### **1.2 : Landasan Hukum**

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

##### **1.3 : Maksud dan Tujuan**

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

##### **1.4 : Sistematika Penulisan**

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

##### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.
2. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan indikator kinerja kunci (IKK).
3. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).
4. Penyajian pada bab ini memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur PD;
  - b. Sumber daya PD;
  - c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan PD;
  - d. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
  - e. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (jikalau ada); dan
  - f. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab PD (jikalau ada).

2.2 : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian.
2. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
3. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga -44- pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD.
4. Merumuskan isu strategis daerah {dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari:

a. permasalahan; b, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan c. potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

### BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 : Tujuan Renstra PD Kota Dumai Tahun 2025- 2029

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada :
  - a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Mempertimbangkan kondisi sesuai dengan PD yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra PD cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
3. Jika PD mampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra PD direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

#### 3.2 : Sasaran Renstra PD Kota Dumai Tahun 2025- 2029

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. dan bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

3.3 : Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029;

1. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD
2. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.
3. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/ atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.4 : Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

## BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
2. Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.
4. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
5. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
6. IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

## BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1.a Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian terdiri dari 3 bidang sebagai berikut.

##### **2.1.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan**

Selama kurun waktu 2019-2023 pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Dumai adalah sebesar 8,43% dengan pertumbuhan Koperasi aktif sebesar 1,54%. Namun selama kurun waktu tersebut jumlah anggota koperasi mengalami penurunan rata-rata 0,42% per tahun. Dari sisi permodalan koperasi, terjadi kenaikan atas modal sendiri sebesar 7,56% pertahun Dimana pada tahun 2019 modal sendiri sebesar 64,074 milyar menjadi 85,761 milyar pada tahun 2023. Kenaikan juga terjadi pada modal luar Dimana terjadi kenaikan rata-rata pertahun sebesar 8,12% Dimana pada tahun 2019 sebesar 38,654 milyar menjadi 52,827 milyar pada tahun 2023. Kenaikan yang signifikan terjadi pada Volume usaha koperasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 37,32% pertahun dengan pertumbuhan rata-rata sisa hasil usaha koperasi sebesar 11,85% pertahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.1  
Perkembangan Koperasi di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	225	245	271	288	310	8,34
2.	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	190	163	163	180	202	1,54
3.	Anggota	18.976	19.342	19.273	17.925	18.659	-0,42
4.	Modal Sendiri (Rp. Juta)	64.074	68.799	76.347	81.366	85.761	7,56
5.	Modal Luar (Rp. Juta)	38.654	40.601	52.247	35.340	52.827	8,12
6.	Volume Usaha (Rp. Juta)	62.986	64.575	146.432	140.209	223.955	37,32
7.	SHU (Rp. Juta)	10.602	11.044	14.536	15.053	16.594	11,85

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, 2024*

### **2.1.2 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan usaha mikro**

UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sendiri membedakan usaha menjadi empat jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri

kecil, perdagangan kecil dan kerajinan. Perkembangan UMKM periode 2019-2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,58 % per tahun atau menurun dari 16.324 unit menjadi 11.274 unit.

Tabel 2.1.2.1

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Pertumbuhan / Tahun (%)
1.	Usaha Mikro dan Kecil	16.324	16.116	6.515	8.779	11.274	0,58

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2019-2023 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dan apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di Kota Dumai pada tahun 2023 sebanyak 11.274 UMKM, maka jumlah pendamping ini belum memadai dengan rasio 1: 1.611. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2

Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2020- 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	7	7	7	7

Selanjutnya Rekapitulasi perkembangan jumlah UMKM Kota Dumai Tahun 2023. Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2019-2023 mengalami perkembangan fluktuasi. Kecamatan Dumai Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,77% per tahun atau mengalami peningkatan dari 1.497 unit meningkat menjadi 1.629 unit. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Dumai Timur karena mengalami penurunan UMKM dari 3.231 unit ditahun 2019 menurun menjadi 1.636 unit denga pertumbuhan sebesar 5,88% per

tahun. Perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.1.2.3  
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan  
di Kota Dumai Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Dumai Barat	2.837	591	891	1.196	1.556	8,98
2.	Dumai Timur	3.231	679	957	1.279	1.636	5,88
3.	Bukit Kapur	2.182	620	892	1.220	1.573	9,50
4.	Medang Kampai	1.656	671	938	1.277	1.636	11,14
5.	Dumai Selatan	1.497	680	953	1.269	1.629	11,77
6.	Dumai Kota	2.701	690	962	1.308	1.667	7,09
7.	Sungai Sembilan	2.030	682	922	1.230	1.577	7,60
Jumlah		14.874	4.613	6.515	8.779	11.274	8,85

### **2.1.3 Bidang Perindustrian**

#### **1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB**

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2019 sebesar 57,73% kemudian naik menjadi 61,25% tahun 2023 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 1,50% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 58,66% tahun 2019 menjadi 62,08% tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,44% per tahun.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam Tabel 2.1.3.1 berikut ini.

Tabel 2.1.3.1  
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai  
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan PDRB-ADHB	57,73	59,96	60,82	61,8	61,25	1,50
2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan PDRB-ADHK	58,66	61,06	61,4	62,18	62,08	1,44

*Sumber: BPS BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024*

### 1. **Pertumbuhan Industri**

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami penurunan sebesar 34,82 % dari 2,32% pada tahun 2019 turun menjadi -0,89% pada tahun 2023. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.2 berikut.

Tabel 2.1.3.2  
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai  
Tahun 2019-2023

No	Sektor	Satuan	Tahun					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Industri Pengolahan	%	2,32	3,86	1,43	1,61	-0,89	-34,82

*Sumber: BPS BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024*

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global. Berikut Tabel Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.1.3.3  
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
<b>I. Industri Kerajinan</b>				
1.	Kerajinan Tenun	15	Tempat Air Mineral Tempat tisu Tempat telur Kain songket Tepak sirih Tempat buah	Kel. Purnama Kel. Bagan Keladi Kel. Stdi Kel. Laksamana Kel. Rimba Sekampung Kel. Bukit Timah
2.	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral Gehal Tempat telur Bunga Kristal Tepak sirih Tempat buah Tempat tisu	Kel. Purnama Kel. Bagan Keladi Kel. Bintan Kel. Rimba Sekampung Kel. Bukit Datuk
3.	Kerajinan Manik Manik	3	Tempat tisu Tempat bunga Tempat Air Mineral	Kel. Bukit Datuk Kel. Bagan Besar Kel. Ratu Sima

4.	Kerajinan Buah Para dan Kelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan dinding	Kel. Purnama
5.	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6.	Kerajinan Anyaman Pandan	10	Tikar	Kel. Mundam
7.	Kerajinan Limbah Plastik	7	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8.	Kerajinan plastic tali rafia	5	Bunga	Kel. Mundam
9.	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintan
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10.	Kerajinan Konveksi	50	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaian olah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintan
			Jas	Kel. Purnama
			Baju kaos	Kel. Dumai Kota
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima

				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11.	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	3	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	
12.	Kerajinan Batik	8	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	
13.	Kerajinan Rotan	2	Kursi, Meja, Fertisi	Kel. Bintan
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dll	
<b>II. Industri Percetakan Dan Advertising</b>				
14.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetak	Kel. Teluk binjai
				Kel. Rimba Sekampung
				Kel. Sukajadi
				Kel. Dumai Kota
15.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintan
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendera Mata/Pamplet	
			Banner	
	<b>Jumlah Pengrajin</b>	<b>192</b>		

*Sumber: Dinas Perindustri, Koperasi dan UKM, 2024*

Evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah pada 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

❖ Indikator Persentase Koperasi aktif, indikator ini didukung dengan 3 program yaitu :

- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 berjumlah 222 koperasi atau sebesar 67,27% dari jumlah koperasi pada tahun 2024 sebesar 330 Koperasi.
- Program Pendidikan dan latihan perkoperasian, dengan indikator program persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan pada tahun 2024 jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan berjumlah 60 koperasi atau 0.32% dari 18.756 Koperasi.
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, dengan indikator Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota pada tahun 2024 sebesar 222 Koperasi atau 67,72% dari 330 Koperasi.

- ❖ Indikator Persentase Usaha Mikro dan Kecil, indikator ini didukung dengan 2 program yaitu :
  - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan indikator pertumbuhan wirausaha, pada tahun 2024 pertumbuhan wirausaha sebesar 1.260 UMKM atau 10,05% dari 12.534 UMKM, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan wirausaha meningkat ini disebabkan minat masyarakat untuk membuka usaha di era globalisasi.
  - Program Pengembangan UMKM, dengan indikator Proporsi UKM menjalin kemitraan, pada tahun 2024 UMKM yang menjalin kemitraan sebesar 354 UMKM atau 2,82% dari 12.534 UMKM.
- ❖ Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB, indikator ini didukung dengan 1 program yaitu :
  - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan indikator Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi Perda, pada tahun 2024 sebesar 0%, dikarenakan tidak didukung oleh anggaran
- ❖ Persentase Cakupan Bina Kelompok Pengrajin, indikator ini didukung dengan 1 program yaitu :
  - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, pada tahun 2024 IKM yang dilatih sebesar 77,03%.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mempunyai tugas Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan.

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan pengawasan .

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis dibidang perindustrian.

UPT mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

**a. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- b. Perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- c. Pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- d. Pembinaan dalam pemberian dukungan permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan pemasaran hasil koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan koperasi, pengusaha kecil dan menengah; dan
- f. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

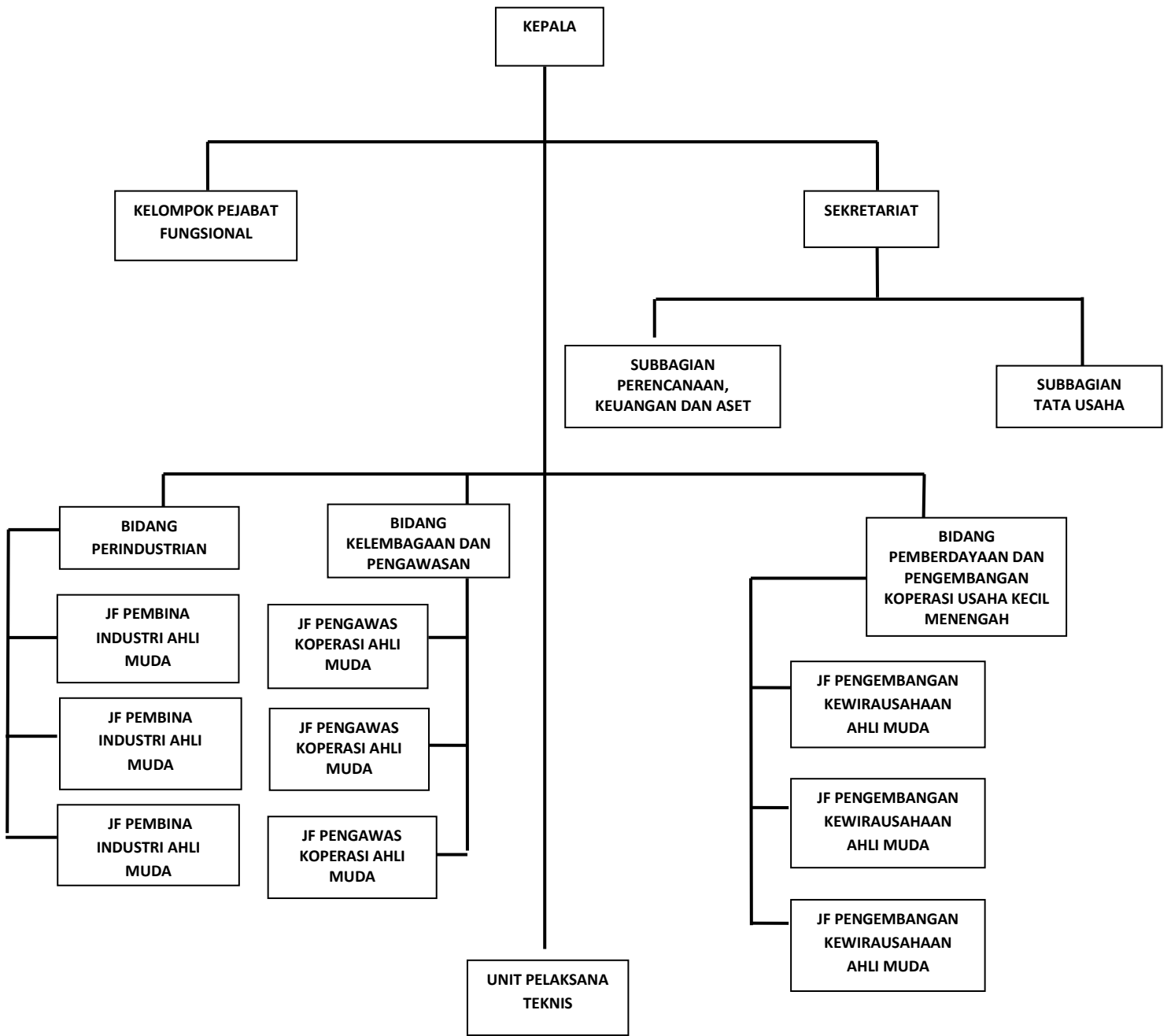
## **b. Struktur Organisasi**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 45 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai. Dengan demikian Struktur Organisasi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
  2. Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
  - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
  - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda
- e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
  - 3 (Tiga) Jabatan Fungsional Pembina Industri Ahli Muda
- f. UPT.

Dari uraian struktur organisasi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan dimana Kepala Dinas adalah pejabat Struktural setingkat eselon II sedangkan Sekretariat dan Kepala Bidang lainnya adalah pejabat Struktural setingkat eselon III dan masing-masing mempunyai bawahan kelompok jabatan fungsional.

Susunan serta komposisi secara lengkap pejabat struktural yang definitip dapat dilihat pada bagan organisasi berikut :



**c. Sumber Daya Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian telah memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:

**❖ Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai negeri sipil dan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai saat ini berjumlah 83 orang terdiri dari :

**Tabel II.C.1**

**Komposisi Pegawai Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

<b>No</b>	<b>Jabatan/Esselon</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1.</b>	Pejabat Esselon II	1	
<b>2.</b>	Pejabat Esselon III	4	
<b>3.</b>	Pejabat Esselon IV	4	
<b>5.</b>	Jabatan Fungsional	10	
<b>6.</b>	Pelaksana	9	
<b>7.</b>	Tenaga Kerja Sukarela	38	
<b>8.</b>	Tenaga Kerja lapangan	12	
<b>9.</b>	Tenaga Akuntansi	1	
<b>10.</b>	Tenaga Digiloka	4	
	Jumlah	83 Orang	

Adapun jumlah Pegawai dan Komposisinya berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.C.2**

**Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	S2	11	
2.	S1	11	
3.	D3	3	
4.	SLTA	2	
5.	SLTP	1	
6.	SD	-	

Permasalahan yang dihadapi dalam pendayagunaan SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian adalah penempatan personil yang belum tepat sasaran, dimana personil yang selalu dimutasi keluar OPD, sedangkan penggantinya pada umumnya tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai, sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan, sehingga menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan tugas sesuai tupoksi.

Selain itu Dinas Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai telah memiliki tenaga Fungsional sebagai ujung tombak dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

d. **Sarana gedung**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian saat ini menempati Gedung Dekranasda, BLI-UPT menempati gedung Balai latihan Industri UPT, dan Dekranasda Dumai Menempati Gedung TIC Dumai.

b. **Sarana perlengkapan kantor**

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sangat ditentukan oleh dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dan sehingga ini sarana dan prasarana kerja dapat dikatakan cukup meskipun belum sempurna.

c. **Alat transportasi**

Untuk menunjang kelancaran operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memiliki kendaraan operasional dinas terdiri dari :

- a. Kendaraan roda empat : 3 unit
- b. Kendaraan roda dua : 12 unit

## **2.2 Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan Kota Dumai. SDM yang berkualitas sangat penting untuk mendukung daya saing daerah dalam menghadapi persaingan global. Namun, saat ini masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan tenaga kerja, dan terbatasnya akses terhadap pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, kurangnya program pendidikan yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri menyebabkan minimnya kesiapan tenaga kerja lokal untuk bersaing. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM melalui pendidikan berkualitas, pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang masih lambat menjadi penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor tertentu, serta kurangnya diversifikasi usaha, menyebabkan rendahnya produktivitas dan terbatasnya lapangan kerja. Selain itu, minimnya investasi di sektor produktif dan kurang optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperparah kondisi ini. Upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perlu difokuskan pada pengembangan sektor-sektor potensial, peningkatan iklim investasi yang kondusif, serta penguatan kapasitas UMKM dalam mengakses pasar dan teknologi.

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan

tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai di masa mendatang, sebagai berikut:

Tabel 2.2.1  
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mengah dan  
Perindustrian Kota Dumai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menghambat daya saing Kota Dumai	Terbatasnya lapangan kerja dan kewirausahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya akses permodalan bagi UMKM.</li> <li>2. Lemahnya pembinaan dan pelatihan kewirausahaan dari pemerintah.</li> </ol>
2	Lambatnya pertumbuhan perekonomian Kota Dumai yang berdampak pada rendahnya produktivitas	Rendahnya daya saing UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya akses permodalan dan teknologi.</li> <li>2. Kurangnya pelatihan kewirausahaan.</li> <li>3. Lemahnya promosi produk lokal.</li> </ol>
3.	Masih Sulitnya Permodalan Bagi UMKM	Minimnya penerima dana pinjaman untuk UKM	Kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengembalian pinjaman

4.	Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum optimal	Kurangnya hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain (baik pemerintah maupun swasta) dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional	Anggaran
----	--	--	----------

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

- Memberikan dukungan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pembinaan.
- Memberikan dukungan penuh kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas tugas pembinaan koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

#### 2.2.a **Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Rencana strategis**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029 dimana Rancangan Awal RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Dumai terpilih periode 2025-2029.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Dumai yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah "Kota Industri yang Unggul, Sejahteraan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Dumai sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2029 yaitu "Kota Industri yang Unggul, Sejahteraan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Dumai 2025-2029 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Dumai 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- ❖ Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing
- ❖ Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
- ❖ Misi 3 : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif
- ❖ Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel.

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian selaku Pembina Koperasi dan Usaha Mikro mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: "Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif".

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun penetapan-penetapan tujuan dan indikator tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi, UKM dan Industri yang berdaya saing dengan indikator kinerja sebagai berikut :
  - Persentase penambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota
  - Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
  - Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha

### 3.2 Sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan elemen di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Adapun sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yaitu:

- Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing

Indikator Sasaran : Persentase Koperasi Aktif dan Pertumbuhan Usaha Mikro

- Meningkatnya Daya Saing IKM

Indikator Sasaran : Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)

Secara keseluruhan berikut tabel tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini:

**TABEL 3.2.1**

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN  
TAHUN 2025 S/D 2030**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi, UKM dan Industri yang berdaya saing	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi,	Persentase Koperasi Aktif	68%	69%	70%	71%	72%	72%
		Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing	Pertumbuhan Usaha Mikro	1.260 UMKM	2.100 UMKM	2.940 UMKM	3.780 UMKM	4.620 UMKM	5.460 UMKM
		Meningkatnya Daya Saing IKM	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	1,26%	1,27%	1,29%	1,28%	1,27%	1,30%

### 3.3 Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Sehubungan dengan itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menindaklanjuti pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai 2025-2029 perlu menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai Tahun 2025-2029, yang berisikan langkah - Langkah upaya yang perlu dilakukan tersebut tersaji dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai pada tabel yang terdiri dari Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Terlampir)

**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai**

**Visi : "Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029"**

**MISI III : Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif**

TUJUAN PEMERINTAH KOTA DUMAI					SASARAN PEMERINTAH KOTA DUMAI									
<b>1. Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing</b>					Batasan : Meningkatkan Pendapatan Per kapita									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				Kondisi Akhir	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun				Kondisi Akhir	
		2025	2026	2027	2028				2029	2030	2025	2026		2027
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74	5,78	5,83	5,87	5,91	Perentase Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	66,11	65,27	65,04	64,50	63,96	66,11
		6,12	5,84	5,89	5,93	5,97			69,11	68,36	67,61	66,86	66,11	63,96-66,11

Tujuan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM					Sasaran Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM									
<b>Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi, UKM dan Industri yang berdaya saing</b>					Batasan : Meningkatkan Daya Saing UKM									
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				Kondisi Akhir	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				Kondisi Akhir	
		2025	2026	2027	2028				2029	2030	2025	2026		2027
Pertentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	%	13	15	17,5	19	21	Perentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	1,26	1,27	1,29	1,28	1,27	1,3
Pertentase Meningkatnya Koperasi yang Berhasil	%	35	36	37	38	39								
Pertentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	30	32	34	36	38								

Batasan : Fasilitas dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing							
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				Kondisi Akhir	
		2025	2026	2027	2028		2029
Perentase Koperasi Aktif	%	68	69	70	71	72	72
Dorumbuhan Usaha Mikro	UMEM	1.260	2.100	2.940	3.780	4.620	6.460

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN										
Sasaran : Terlaksananya Dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA					Sasaran : Terselenggaranya Dokumen Rencana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota										
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030		
		2025	2026	2027	2028				2029	2030	2025	2026		2027	2028
Perentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	%	10	12	14	16	18	20	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	4	4	4	4	4

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI															
Sasaran : Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di area Risk/Zero, dan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIBAS															
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030		
		2025	2026	2027	2028				2029	2030	2025	2026		2027	2028
Perentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	%	7	8	10	11	12	14	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Industri yang diberikan fasilitas	Dokumen	5	2	2	2	2	2

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL															
Sasaran : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Perizinan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri															
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030		
		2025	2026	2027	2028				2029	2030	2025	2026		2027	2028
Terdapatnya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terpadu	%	8	10	11	12	13	14	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIBAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Dokumen	3	4	4	4	4	4

SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN							
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota							
Sasaran : Terselenggaranya Rencana Pembangunan Industri							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	
		2025	2026	2027	2028		2029
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan perizinan pengembangan, penyebaran dan perwujudan industri							
Sasaran : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Perizinan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwujudan Industri							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	
		2025	2026	2027	2028		2029
Jumlah Dokumen tentang kebijakan perizinan pengembangan dan perwujudan industri	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri							
Sasaran : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	
		2025	2026	2027	2028		2029
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
Sasaran : Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	
		2025	2026	2027	2028		2029
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIBAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRBA)							
Sasaran : Terfungsinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIBAS yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET				Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	
		2025	2026	2027	2028		2029
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penertiban perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIBAS yang terintegrasi dengan OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	5	1	1	1	1	1

Koordinat dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perilaku Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kemungkinan Pada Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	
<p><b>Rincian</b></p> <p>Terlaksananya Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perilaku Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Pemukiman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</p>							
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perilaku Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Pemukiman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data Latah Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kemungkinan Pada Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	
<p><b>Rincian</b></p> <p>Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Latah Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)</p>							
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Latah Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINa)	Dokumen	2	2	2	2	2	2

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINa							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kemungkinan Pada Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	
<p><b>Rincian</b></p> <p>Terpenuhi dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINa</p>							
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIIINa	Dokumen	1	1	1	1	1	1

Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINa							
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kemungkinan Pada Tahun 2030
		2025	2026	2027	2028	2029	
<p><b>Rincian</b></p> <p>Pemenuhannya Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINa</p>							
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIINa	Dokumen	0	1	1	1	1	1

PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM					KEGIATAN DINAS KOPERASI,UKM DAN					SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI,UKM DAN PERINDUSTRIAN										
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>					<b>Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam</b>					<b>Sub Kegiatan Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</b>										
Sasaran: Terlaksananya Pemeriksaan dan pengawasan					Sasaran: Terlaksananya Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan pengurus					Sasaran: Terlaksananya Pengawasan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi										
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2024	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2025	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2026			
Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		40	45	50	55	60	Unit Usaha	110	114	118	122	126	130	Unit Usaha	45	47	49	51	53	55
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSPUSP KOPERASI</b>					<b>Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah</b>					<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang</b>										
Sasaran: Terlaksananya penilaian KSPUSP					Sasaran: Terlaksananya KSPUSP Koperasi yang dinilai kesehatannya					Sasaran: Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang										
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Persentase Koperasi AMF	%	2025	2026	2027	2028	2029	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		13,13	15,13	17,13	19,13	21,13	52	56	60	64	68	73	65	67	69	71	73	75	75	75
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>					<b>Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Kelembagaan dalam</b>					<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>										
Sasaran: Terlaksananya Pendidikan dan latihan perkoperasian					Sasaran: Terlaksananya Koperasi yang menguji pelatihan untuk koperasi dalam					Sasaran: Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSPUSP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Persentase Koperasi yang diberikan bakunya fasilitas pelatihan	%	2025	2026	2027	2028	2029	Orang	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		25,55	25,55	27,55	29,55	30	70	40	78	81	84	87	14	21	25	28	27	27	27	27
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>					<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah</b>					<b>Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Miliput Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan</b>										
Sasaran: Terlaksananya Koperasi yang diberi Fasilitas Pendampingan					Sasaran: Terlaksananya Koperasi yang diberi fasilitas pendampingan kelembagaan untuk					Sasaran: Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko,										
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	2025	2026	2027	2028	2029	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		40	40	42	44	46	136	136	136	136	136	136	26	29	32	35	38	42	42	42
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA BENEHANG, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>					<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dibakukan melalui Pendanaan, Kemiripan, Pemulihan</b>					<b>Sub Kegiatan Penyalangan Pemahaman dan Penguatan Persepsi dan Kompetensi SDM Koperasi</b>										
Sasaran: Terlaksananya Pendanaan Usaha Mikro					Sasaran: Tersedianya Jumlah Usaha Mikro					Sasaran: Tersedianya Pemahaman dan Penguatan Persepsi dan Kompetensi SDM Koperasi										
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Persentase Usaha Kecil yang Restrukturisasi dan Informalisasi Formal	%	2025	2026	2027	2028	2029	UMKM	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Orang	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		25	30	35	40	45	10.080	1.395	2.370	2.820	3.270	3.300	70	75	78	81	84	87	87	87
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>					<b>Kegiatan Pengembangan Usaha dengan Orientasi Peningkatan Skalabilitas Mengadai Usaha Kecil</b>					<b>Sub Kegiatan Pemenuhan Kelembagaan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hukup Keluarga</b>										
Sasaran: Terlaksananya Pembinaan Usaha Mikro					Sasaran: Tersedianya Jumlah UMKM yang dibina					Sasaran: Terlaksananya Pemenuhan Kelembagaan Keluarga dalam Peningkatan Tarif Hukup Keluarga										
INDIKATOR PROGRAM/OUTCOME	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Proporsi UMKM menjadi mitra dan pasar	%	2025	2026	2027	2028	2029	UMKM	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Keluarga	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		7	10	13	16	19	115	200	270	290	310	330	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Sub Kegiatan Fasilitas Kemiripan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Tersedianya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemiripannya</b>					<b>Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemiripan Usaha Mikro</b>										
Sasaran: Tersedianya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemiripannya					Sasaran: Tersedianya Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemiripannya					Sasaran: Tersedianya Pemberdayaan Melalui Kemiripan Usaha Mikro										
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemiripannya	Unit Usaha	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
		36	36	36	36	36	63	10	15	20	25	30	63	10	15	20	25	30	30	
<b>Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>					<b>Tersedianya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</b>					<b>Sub Kegiatan Fasilitas sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro</b>										
Sasaran: Tersedianya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Sasaran: Tersedianya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Sasaran: Tersedianya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro										
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET			Kondisi Kinerja Pada Tahun 2030			
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	UMKM	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	
		250	100	200	205	210	36	10	20	30	40	50	36	10	20	30	40	50	50	

Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Instrumen Publik							
Sasaran		Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Instrumen Publik melalui terminal, bandara, stasiun					
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2020
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	UMKM	25	5	20	25	30	35

Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro							
Sasaran		Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro					
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2020
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah Unit Usaha Mikro Tersada	UMKM	1.260	1.260	2.100	2.520	2.940	2.940

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Ketrampilan Misi Perikanan dan Perikanan							
Sasaran		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Ketrampilan					
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2020
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan	UMKM	55	10	15	20	25	30

Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi							
Sasaran		Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi					
INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Tahun 2020
		2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya manusia, serta Desain dan Teknologi	UMKM	200	200	270	290	310	330

**POHON KINERJA 2025-2029**

Visi : Kota Industri yang Unggul, Sejahtera dan Berkelanjutan Berdasarkan Budaya Melayu Tahun 2029

MISI III : Mewujudkan Perekonominan Kota yang Produktif

<b>TUJUAN PERANGKAT DAERAH</b>	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi, UKM dan Industri yang berdaya saing																				
	Persentase pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota																				
	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berdaya Sain																				
	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi perusahaan																				
<b>SARAPAN 1 PERANGKAT</b>	Meningkatnya Daya Saing UKM																				
	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)																				
<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b> Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b> Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b> Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini																		
<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	Penyusunan dan Esahasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (EPKI) Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Industri yang diberikan fasilitas	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan EPKI Kabupaten/Kota  Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan kawasan industri																		
<b>SUB KEGIATAN PRIORITAS</b>	<table border="1"> <tr> <td>Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota</td> <td>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri</td> <td>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri</td> <td>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri</td> <td>Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri</td> <td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri</td> <td>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</td> </tr> </table>	Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	<table border="1"> <tr> <td>Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRIBA)</td> <td>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</td> </tr> <tr> <td>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</td> <td>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</td> </tr> </table>	Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRIBA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	<table border="1"> <tr> <td>Fasilitas Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</td> <td>Pemantapan dan Evaluasi kesiapan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke</td> <td>Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</td> <td>Jumlah Dokumen Hasil Pemantapan dan Evaluasi Kesiapan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS</td> <td>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS</td> </tr> </table>	Fasilitas Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pemantapan dan Evaluasi kesiapan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantapan dan Evaluasi Kesiapan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS
Penyusunan Rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen tentang kebijakan percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
Fasilitas Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSSRIBA)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat																				
Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sejangjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat																				
Fasilitas Pengumpulan, pengolahan dan analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Pemantapan dan Evaluasi kesiapan perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS																			
Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Langkah Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantapan dan Evaluasi Kesiapan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Langkah Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS																			

<b>SARAPAN 2 PERANGKAT</b>	Fasilitas dan Pemastian Kelayakan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing					
	1. Persentase Koperasi Aktif 2. Pertumbuhan Usaha Mikro					

<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b> Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b> Persentase Koperasi Aktif	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b> Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b> Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b> Proporsi UKM menjadi mitra dan ekspor																								
<b>KEGIATAN PRIORITAS</b>	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang diberi fasilitas pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Produser, Komirran, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Kelayakan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Usaha Mikro	Pengembangan Usaha Mikro dengan Gerakan Pengisian Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah UMKM yang dibina																								
<b>SUB KEGIATAN PRIORITAS</b>	<table border="1"> <tr> <td>Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</td> <td>Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi</td> <td>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan</td> </tr> </table>	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	<table border="1"> <tr> <td>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota</td> <td>Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan</td> <td>Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatannya</td> </tr> </table>	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatannya	<table border="1"> <tr> <td>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</td> <td>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya</td> <td>Fasilitas Mitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td>Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</td> <td>Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kegiatan beroperasian dan pengembangan ekonomi lainnya</td> <td>Jumlah Koperasi yang Dilasilitasi Mitraannya</td> </tr> </table>	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Fasilitas Mitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kegiatan beroperasian dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Koperasi yang Dilasilitasi Mitraannya	<table border="1"> <tr> <td>Pemberdayaan Melalui Mitraan Usaha Mikro</td> <td>Pemberdayaan Kelembagaan Formal dan Pengembangan Usaha Mikro</td> <td>Fasilitas sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro</td> <td>Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Infrastruktur Publik</td> <td>Penyusunan basis Data Usaha Mikro</td> <td>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro</td> <td>Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro</td> <td>Jumlah Usaha Mikro yang tersertifikasi</td> <td>Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi</td> <td>Jumlah Unit usaha Mikro Terdata</td> <td>Jumlah Unit Usaha UMKM yang memahami Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaan, Sumber daya manusia, serta Desain dan Teknologi</td> </tr> </table>	Pemberdayaan Melalui Mitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Formal dan Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitas sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Infrastruktur Publik	Penyusunan basis Data Usaha Mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang tersertifikasi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Jumlah Unit usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memahami Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaan, Sumber daya manusia, serta Desain dan Teknologi
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota																													
Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan																													
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																													
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatannya																													
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Tawar Hidup Keluarga Melalui Kegiatan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Fasilitas Mitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																												
Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kegiatan beroperasian dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Koperasi yang Dilasilitasi Mitraannya																												
Pemberdayaan Melalui Mitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Formal dan Pengembangan Usaha Mikro	Fasilitas sertifikasi dan standarisasi Usaha Mikro	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Infrastruktur Publik	Penyusunan basis Data Usaha Mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan dan Pelatihan																									
Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Mitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang tersertifikasi	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Jumlah Unit usaha Mikro Terdata	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memahami Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaan, Sumber daya manusia, serta Desain dan Teknologi																									

**TABEL 3.3.1****TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI III : Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif			
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Koperasi, UKM dan Industri yang berdaya saing	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdaya saing	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Manajemen dan SDM Pengelola Koperasi	1. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi  2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan, manajemen dan SDM Pengelola UMKM	1. Pemberdayaan Pelaku usaha Mikro melalui peningkatan sdm, pengembangan potensi usaha dan kemitraan  2. Peningkatan skala usaha dan peningkatan kualitas produk usaha mikro
		Meningkatkan Pertumbuhan IKM	Penguatan dan Penumbuhan IKM melalui produksi, pemasaran, desain kemasan merek dan legalitas
Meningkatnya Daya saing IKM			

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>											
- 3.1.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global - 3.1.3. Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian dan daya saing industri		Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	21	21.5	22	22.5	23	23.5	23.5	
			Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	3	5	6	7	8	10	10	
		Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	13	15	17	19	21	23	23	
			Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	71	68	69	70	71	72	72	
			Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	39	40	41	42	43	44	44	
			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	19	20	21	22	23	24	24	
			Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	70	70	75	80	85	90	95	
			Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	25	25	27	29	31	33	33	
			Meningkatnya daya saing industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah (%)	8	10	12	14	16	18	20
		Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan (%)		6	7	8	10	11	12	14	
		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)		7	8	10	11	12	13	14	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Dumai yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai tahun 2025- 2029, maka disusunlah program, kegiatan, sub kegiatan target kinerja serta target pendanaan indikatif. Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam lima tahun mendatang.

Adapun program dan kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
- PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI
- PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
- PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Adapun rincian program, kegiatan serta target indikator dan pendanaan selama periode 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel 4.3.

#### 4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai sebagai acuan untuk pencapaian maupun progress dalam implementasi Rencana Strategis untuk setiap tahunnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Dumai tahun 2025 - 2029. Rumus perhitungan Indikator Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Berikut Rumus Perhitungan Indikator Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagai berikut :

No	Bidang Urusan/Indikator	Rumus
1.	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif} \times 100}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$
2.	Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Komulatif UMKM Pertahun
4.	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	$\frac{\text{Jumlah Pertumbuhan IKM Binaan} \times 100}{\text{Jumlah Total IKM}}$

Dari rumus diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian menetapkan Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai 2025-2029 Tabel Indikator (terlampir).

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.476.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00		9.556.400.867,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00		7.146.165.200,00	
Tertelaksananya Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Perindustrian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perindustrian (%)	100	100	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	100	7.146.165.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	35	40	45	200.000.000,00	50	200.000.000,00	55	200.000.000,00	60	200.000.000,00	65	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00		109.842.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	65	68	69	109.842.000,00	70	109.842.000,00	71	109.842.000,00	72	109.842.000,00	72	109.842.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	35	40	41	100.000.000,00	42	110.000.000,00	43	110.000.000,00	44	110.000.000,00	44	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20	20	21	215.000.000,00	22	215.000.000,00	23	215.000.000,00	24	215.000.000,00	24	215.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					565.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00		1.305.393.667,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20	25	30	565.393.667,00	35	1.305.393.667,00	40	1.305.393.667,00	45	1.305.393.667,00	50	1.305.393.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					140.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00		470.000.000,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	5	7	10	140.000.000,00	13	470.000.000,00	16	470.000.000,00	19	470.000.000,00	21	470.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah (%)	5	10	12	310.000.000,00	14	310.000.000,00	16	310.000.000,00	18	310.000.000,00	20	310.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan (%)	5	7	8	60.000.000,00	10	60.000.000,00	11	60.000.000,00	12	60.000.000,00	14	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	5	8	10	90.000.000,00	11	90.000.000,00	12	90.000.000,00	13	90.000.000,00	14	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					8.936.400.867,00		10.016.400.867,00		10.016.400.867,00		10.016.400.867,00		10.016.400.867,00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>		
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>									
- 3.1.3. Produktivitas Ekonomi - 3.1.2. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian dan daya saing industri	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian			Kontribusi UMKM terhadap PDRB				
					Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB				
					Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi				
					Persentase Koperasi Aktif				
					Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan				
					Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas				
					Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal				
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor				
					Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
					Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Jumlah Usaha mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Jumlah UMKM yang dibina	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya daya saing industri			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah		
					Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan		
					Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Industri yang diberikan fasilitasi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH  
RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>										
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	35	40	45	50	55	60	65	
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	65	68	69	70	71	72	72	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	20	20	21	22	23	24	24	
4	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	20	25	30	35	40	45	50	
5	Proporsi UKM Menjalani Kemitraan dan Ekspor	Persentase	5	7	10	13	16	19	21	
6	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	%	5	10	12	14	16	18	20	
7	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	%	5	7	8	10	11	12	14	
8	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	35	40	41	42	43	44	44	
9	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	5	8	10	11	12	13	14	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS  
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra  
Pemerintah Kota Dumai**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b>				
1.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
3.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
5.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
6.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
7.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
8.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				8.476.400.867		9.556.400.867		9.556.400.867		9.556.400.867		9.556.400.867		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.146.165.200		7.146.165.200		7.146.165.200		7.146.165.200		7.146.165.200		
Terlaksananya Penunjang Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Perindustrian	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perindustrian (%)	100	100	7.146.165.200	100	7.146.165.200	100	7.146.165.200	100	7.146.165.200	100	7.146.165.200	2.17.3.31.0.00.02.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.736.596		15.736.596,5		15.736.596,5		15.736.596,5		15.736.596,5		
Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.736.596	1	15.736.596,5	1	15.736.596,5	1	15.736.596,5	1	15.736.596,5		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.750.519		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.750.519	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000		
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.558.185		1.279.092,5		1.279.092,5		1.279.092,5		1.279.092,5		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.558.185	1	1.279.092,5	1	1.279.092,5	1	1.279.092,5	1	1.279.092,5		
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.304.503		1.275.750		1.275.750		1.275.750		1.275.750		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.304.503	1	1.275.750	1	1.275.750	1	1.275.750	1	1.275.750		
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.226.225		1.226.225		1.226.225		1.226.225		1.226.225		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.226.225	1	1.226.225	1	1.226.225	1	1.226.225	1	1.226.225		
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.233.173		1.233.172,5		1.233.172,5		1.233.172,5		1.233.172,5		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.233.173	1	1.233.172,5	1	1.233.172,5	1	1.233.172,5	1	1.233.172,5		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.663.991		5.722.356,5		5.722.356,5		5.722.356,5		5.722.356,5		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	5.663.991	3	5.722.356,5	3	5.722.356,5	3	5.722.356,5	3	5.722.356,5		
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.832.656.124		5.950.612.847,5		5.950.612.847,5		5.950.612.847,5		5.950.612.847,5		
Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.832.656.124	1	5.950.612.847,5	1	5.950.612.847,5	1	5.950.612.847,5	1	5.950.612.847,5		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	6		6		6		6					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	55		55		55		55					
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.786.253.200		5.881.765.200		5.881.765.200		5.881.765.200		5.881.765.200		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	31	55	5.786.253.200	55	5.881.765.200	55	5.881.765.200	55	5.881.765.200	55	5.881.765.200		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.847.648		1.847.647,5		1.847.647,5		1.847.647,5		1.847.647,5		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.847.648	1	1.847.647,5	1	1.847.647,5	1	1.847.647,5	1	1.847.647,5		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				44.555.276		67.000.000		67.000.000		67.000.000		67.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	6	44.555.276	6	67.000.000	6	67.000.000	6	67.000.000	6	67.000.000		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				15.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	15.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				347.500.000		221.988.000		221.988.000		221.988.000		221.988.000		
Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	347.500.000	12	221.988.000	12	221.988.000	12	221.988.000	12	221.988.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	65.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	12	12	20.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000		
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	198.709.620	1	198.709.620	1	198.709.620	1	198.709.620	1	198.709.620		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				611.685.360		520.038.240		520.038.240		520.038.240		520.038.240		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	611.685.360	1	520.038.240	1	520.038.240	1	520.038.240	1	520.038.240		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.877.500		173.079.896		173.079.896		173.079.896		173.079.896		
Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	123.877.500	2	173.079.896	2	173.079.896	2	173.079.896	2	173.079.896		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	14		14		14							
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	28		28		28							
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000	2	19.000.000		
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				96.480.000		137.380.000		137.380.000		137.380.000		137.380.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	14	96.480.000	14	137.380.000	14	137.380.000	14	137.380.000	14	137.380.000		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.336.000		6.336.000		6.336.000		6.336.000		6.336.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	28	28	6.336.000	28	6.336.000	28	6.336.000	28	6.336.000	28	6.336.000		
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.061.500		10.363.896		10.363.896		10.363.896		10.363.896		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.061.500	1	10.363.896	1	10.363.896	1	10.363.896	1	10.363.896		
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	35	45	200.000.000	50	200.000.000	55	200.000.000	60	200.000.000	65	200.000.000	2.17.3.31.0.00.02.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	45	47	200.000.000	49	200.000.000	51	200.000.000	53	200.000.000	55	200.000.000		
	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	65	67		69		71		73		75			
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	45	47	105.000.000	49	105.000.000	51	105.000.000	53	105.000.000	55	105.000.000		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	65	67	95.000.000	69	95.000.000	71	95.000.000	73	95.000.000	75	95.000.000		
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				109.842.000		109.842.000		109.842.000		109.842.000		109.842.000		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	65	69	109.842.000	70	109.842.000	71	109.842.000	72	109.842.000	72	109.842.000	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				109.842.000		109.842.000		109.842.000		109.842.000		109.842.000		
Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	26	27	109.842.000	28	109.842.000	29	109.842.000	30	109.842.000	31	109.842.000		
	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	26	29		32		35		38		42			
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				39.842.000		39.842.000		39.842.000		39.842.000		39.842.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	26	27	39.842.000	28	39.842.000	29	39.842.000	30	39.842.000	31	39.842.000		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	26	29	70.000.000	32	70.000.000	35	70.000.000	38	70.000.000	42	70.000.000		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				100.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	35	41	100.000.000	42	110.000.000	43	110.000.000	44	110.000.000	44	110.000.000	2.17.3.31.0.00.02.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	70	75	100.000.000	78	110.000.000	81	110.000.000	84	110.000.000	87	110.000.000		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				100.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		110.000.000		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	70	75	100.000.000	78	110.000.000	81	110.000.000	84	110.000.000	87	110.000.000		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	20	21	215.000.000	22	215.000.000	23	215.000.000	24	215.000.000	24	215.000.000	2.17.3.31.0.00.02.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		215.000.000		
Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	36	215.000.000	36	215.000.000	36	215.000.000	36	215.000.000	36	215.000.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	100	100		100		100		100		100			
2.17.06.2.01.0002 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				140.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	100	100	140.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000		
Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	36	75.000.000	36	115.000.000	36	115.000.000	36	115.000.000	36	115.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				565.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	20	30	565.393.667	35	1.305.393.667	40	1.305.393.667	45	1.305.393.667	50	1.305.393.667	2.17.3.31.0.00.02.00 00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				565.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		1.305.393.667		
Jumlah Usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	63	10	565.393.667	15	1.305.393.667	20	1.305.393.667	25	1.305.393.667	30	1.305.393.667		
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	250	100		200		205		210		215			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25	5		20		25		30		35			
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	55	10		15		20		25		30			
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	1.260	1.260		2.100		2.520		2.940		2.940			
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	35	10		20		30		40		50			
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				50.393.667		50.393.667		50.393.667		50.393.667		50.393.667		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	63	10	50.393.667	15	50.393.667	20	50.393.667	25	50.393.667	30	50.393.667		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				284.756.910		925.000.000		925.000.000		925.000.000		925.000.000		
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	250	100	284.756.910	200	925.000.000	205	925.000.000	210	925.000.000	215	925.000.000		
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				20.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	35	10	20.000.000	20	40.000.000	30	40.000.000	40	40.000.000	50	40.000.000		
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	25	5	50.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				140.243.090		220.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		









**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN									
2.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persentase	21	21,5	22	22,5	23	23,5	23,5	
3.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	3	5	6	7	8	10	10	
4.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	13	15	17	19	21	23	23	
5.	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	71	68	69	70	71	72	72	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KOTA DUMAI**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	positif	Persentase	35	40	41	42	43	44	44	
3.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	Persentase	20	20	21	22	23	24	24	
4.	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	positif	Persentase	35	40	45	50	55	60	65	
5.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	20	25	30	35	40	45	50	
6.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	positif	Persentase	5	7	10	13	16	19	21	
7.	Persentase Koperasi Aktif	positif	Persentase	65	68	69	70	71	72	72	
8.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
9.	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	positif	%	5	7	8	10	11	12	14	
10.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	positif	%	5	10	12	14	16	18	20	
11.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	positif	Persentase	5	8	10	11	12	13	14	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan Strategis yang mengacu pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh bidang di lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, Isu isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di laksanakan selama periode Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai diharapkan menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah kota Dumai sebagaimana diamanatkan dalam Ranwal RPJMD Kota Dumai. Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Dumai setiap tahunnya.

Akhir kata kiranya keberhasilan Renstra ini dapat diwujudkan dengan adanya kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikannya untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

KEPALA  
DINAS KOPERASI , USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DUMAI



SEPRANEF SYAMSIR, AP. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740925 199502 1 001